



JALUR HIJAU

Taman Kupu-Kupu Diduga Melanggar

GIANYAR - Objek wisata Taman Kupu-Kupu di jalan raya Kemenuh, Sukawati yang dibangun di kawasan jalur hijau dan belum mengantongi izin, harus segera ditutup. Hal itu ditegaskan Ketua Garda Penerus Pejuang Aspirasi Rakyat (GARPPAR) Ngakan Made Rai, Senin (6/3).

Ngakan Rai mengatakan, Taman Kupu-Kupu sudah jelas-jelas melanggar aturan, karena didirikan di kawasan jalur hijau dan bisa dipastikan tidak mengantongi izin. Kalau obyek wisata tersebut dibiarkan tetap operasi, maka akan banyak muncul pelanggaran-pelanggaran baru. Untuk itu, siapa pun yang ada di belakang Taman Kupu-Kupu harus ditutup. Tentunya harus melalui mekanisme yang ada. "Ditutup sesuai dengan SOP baik itu Surat Peringatan I, II dan penyegelan," ujarnya.

Lebih-lebih, Bupati Gianyar dan juga Ketua DPRD Gianyar dengan tegas meminta agar perda ditegakkan, semua pelanggaran terhadap perda harus diberikan tindakan tegas. "Bupati dengan tegas meminta Satpol PP agar menindak tegas semua pelanggaran perda. Jadi Satpol PP selaku eksekutor harus berani bertindak tegas," paparnya.

Ngakan Rai sangat menyayangkan, Satpol PP batal melakukan penyegelan bangunan yang melanggar aturan di Batuan, karena pemilik bangunan mengancam akan melepon bupati dan demo ke kantor bupati. Jangan sampai karena ancaman seperti ini, justru sikap Satpol PP melunak. "Seharusnya Satpol PP bertindak tegas, apalagi sudah jelas-jelas melanggar aturan. Kalau negara takut dengan demo, nanti situasi di Gianyar semakin runyam. Pelanggaran akan muncul di sana sini," tegasnya.

Pria asal Sampiang, Kecamatan Gianyar ini, meminta Kasatpol PP yang baru, agar tidak hanya mengobok-obok gepeng, spanduk dan pelanggaran-pelanggaran kecil. Tetapi pelanggaran yang besar dan jelas, seperti Taman Kupu-Kupu dibiarkan beroperasi tanpa izin. "Kami tunggu keberanian Satpol PP menutup Taman Kupu-Kupu," tantang dia. (dra/gup)

Edisi : Selasa, 7 Maret 2012

Hal : 26



Pastikan Kerugian Negara ✓

Kasus KPPE Tunggu Penghitungan BPKP

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar masih menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Setelah memeriksa saksi ahli dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kini Kejari Gianyar menunggu perhitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan kerugian negara dari kasus ini.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto, Senin (6/3) kemarin, mengatakan pihaknya kini tinggal menantikan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP. "Kami sudah memeriksa saksi ahli dari Dinas Peternakan Provinsi Bali," ujarnya.

Pemeriksaan saksi ahli itu dilakukan untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum. Usai pemeriksaan ahli, pihaknya langsung mengajukan permohonan memeriksa kerugian negara ke BPKP terhadap bantuan senilai Rp 1 miliar yang dibagikan ke-20 anggota kelompok ternak. "Sekarang kami menunggu BPKP. Setelah dari BPKP, langsung menetapkan tersangka," kata Endra.

Disinggung soal siapa tersangka yang akan dijerat, pihaknya enggan menjawab dengan alasan demi kepentingan penyidikan. Namun, ia menegaskan sudah mengantongi nama yang diduga akan diseret sebagai tersangka. Tersangkanya nanti bisa dari peternak dan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS ikut menerima bantuan KPPE yang notabene diperuntukkan bagi peternak.

Diberitakan sebelumnya, Pidsus Kejari Gianyar telah memeriksa beberapa nama terkait dengan bantuan dana Rp 1 miliar bagi 20 anggota tani. Beberapa nama yang dipanggil di antaranya pengurus kelompok Tani Ternak Dharma Canti dan anggota kelompok yang terdiri atas PNS. (kmb35)



Terminal Cargo di Gilimanuk Batal

Lahan Jadi Tempat Parkir, Dianggarkan Rp 3 Miliar

NEGARA -Pemerintah Kabupaten Jembrana gagal membuat terminal cargo untuk kendaraan yang rencana akan menggunakan lahan kosong di Kelurahan Gilimanuk. Namun, areal yang sudah disiapkan tersebut akan diganti menjadi tempat parkir untuk kendaraan lintas Jawa-Bali dengan anggaran Rp 3 miliar. Rencana, parkir tersebut bisa digunakan paling lambat pada bulan November mendatang.



Kalau mau dibuat cargo, pusat yang menangani sepenuhnya. Sedangkan kami menginginkan dikelola sendiri."

I MADE DWI MAHARIMBAWA
Kadis PKP Jembrana

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Jembrana I Made Dwi Maharimbawa menjelaskan, batalnya rencana pembuatan terminal cargo tersebut karena masalah kewenangan. Pihaknya saat datang ke Kementerian Perhubungan, dijelaskan bahwa jika akan digunakan sebagai terminal cargo maka anggaran dan kewenangan pengelolaan ada

di pemerintah pusat. "Kalau mau dibuat cargo, pusat yang menangani sepenuhnya. Sedangkan kami menginginkan dikelola sendiri," jelasnya, Senin (6/3) kemarin.

Oleh karena itu, rencana pembuatan terminal cargo tersebut langsung dialihkan menjadi tempat parkir bisa untuk kendaraan lintas provinsi. Tahun 2017 ini, pihaknya sudah mengang-

garkan untuk penataan diantaranya dengan pengurukan dan pemasangan paving sebesar Rp 3 miliar. "Nanti fungsinya seperti parkir biasa, tempat sopir untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan," tandas dia.

Selain untuk pembuatan terminal parkir di Gilimanuk, pemerintah kabupaten juga akan membuat terminal penumpang di Desa Kaliakah sebagai pengganti terminal cargo yang ada di kota Negara dengan anggaran untuk terminal penumpang ini sebesar Rp 6 miliar. Sementara terminal cargo yang ada di Kota Negara akan difungsikan sebagai tempat parkir pasar.

Pembangunan parkir dan terminal ini, masih dalam proses persiapan tender sehingga jika sudah ada pemenang agar segera dikerjakan. Karena targetnya, terminal dan parkir selesai paling lambat pada bulan November.

Rencana pembuatan terminal cargo ini, sebenarnya melencong dari rencana semula yang dibuat untuk mengurangi jumlah kendaraan berat seperti truk yang menuju Denpasar. Kendaraan yang membawa muatan berlebih akan dikumpulkan di terminal cargo dan akan dibawa oleh kendaraan yang lebih kecil agar tidak merusak jalan Gilimanuk-Denpasar. (bas/gup)

Edisi : Selasa, 7 Maret 2017

Hal : 5